

PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, DAN PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGANDAERAH
(Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu)

Putri Novita Munthe

Program Studi : S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

e-mail : putrinovita164@gmail.com

Muhammad Fahmi

Program Studi: S-1 Akuntansi STIE IBBI Medan

e-mail : aqilmumtazkaffi01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Responden dalam penelitian ini merupakan Staf Auditor Inspektorat. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 32 responden dari 35 kuesioner yang disebar. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi ($Adjusted R^2$), uji F, dan uji t. Hasil penelitian terbukti bahwa variabel *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Secara parsial, variabel *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Kata Kunci: *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Abstract

This study aimed to examine the effect of personal background, knowledge of regional financial management towards the auditor's role of the inspectorate in regional financial supervision of the district labuhan batu. Respondents in this study are staff of inspectorat auditor. The number of respondents in this study are 32 respondents from 35 distribute questionnaires. Based on the result of questionnaire data processing using data quality test, descriptive statistical analysis, calssical assumption test, multiple linear regression analysis, an hypothesis testing consulting of determination coeffercient ($Adjusted R^2$), f test, t test. The results of the study prove that variabel personal background, knowladge of regional financial mangement simultaneously has a significant effect on the auditor's roles in inspectorate in regional financial supervision district labuhan batu. Partially variabel personal background, knowladge of regional financial mangement has a significant effect on the auditor's roles in inspectorate in regional financial supervision district labuhan batu

Keyword: *Personal Background, Knowledge of regional financial management, and on The Auditor's Roles in Regional Financial Supervision*

1. PENDAHULUAN

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Implikasi dari desentralisasi adalah perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran keuangan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winanrna dan Murni (2007). Inspektorat Kabupaten/ Kota, wajib melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 24 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota mengemban tugas, pokok dan fungsinya, dalam pemeriksaan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil dari pemeriksaan rutin berupa laporan hasil pemeriksaan yang akan diserahkan kepada kepala daerah. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan suatu penguatan pada sisi pengawasan. Pemerintah kota dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan ini dilakukan oleh auditor inspektorat pemerintah daerah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka jelas peranan auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari pengawasan auditor inspektorat, yaitu masih rendahnya peranan inspektorat daerah dalam keseluruhan proses atau siklus pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *personalbackground* dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu baik secara simultan maupun parsial.

2. TINJAUAN LITERATUR

Personal Background

Personal Background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winanrna dan Murni, 2007).

Menurut Wiley (2002:3) mendefinisikan *personal background* adalah Bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/ Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Buptati serta secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kotamempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah kasus pengaduan bidang perekonomian kersa, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang Aset, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus bidang pendapatan dan belanja dan pelaksanaan urusan Pemerintahan dan kasus bidang Pemerintahan umum dan kepegawaian. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah Kabupaten/kota. Hasil dari pemeriksaan rutin berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang-bidang kerja.

Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur. Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Nisa dan Irmadariyani (2016) menyatakan bahwa pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Salim (2006:35) dalam Handoyono dan Trisnowati (2011) menyatakan bahwa pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Berdasarkan Pasal I PP 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penata usahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggung jawaban dan pengawasan.

Review yang dilakukan aparat Inspektorat adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Semua proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dipahami oleh auditor Inspektorat. Hal ini berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, auditor internal pemerintah daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat. Hingga sekarang ini belum seluruh pemerintah daerah menamai organisasi auditor internalnya sebagai inspektorat. Beberapa pemerintah daerah masih menamakan organisasi auditor internalnya sebagai Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Inspektorat dan Bawasda memiliki arti dan makna yang sama sebagai auditor internal pemerintah daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah disebut Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP). Proses audit internal menurut Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Penyusunan rencana pengawasan, Rencana Pengawasan, Pelaksanaan pengawasan, Hasil pengawasan, Tindak lanjut hasil pengawasan, Pemantauan dan pemutahiran. Auditor inspektorat harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam proses pelaksanaan audit internal jika tidak memiliki pengetahuan tersebut, maka independensinya diragukan baik independensinya dalam kenyataan, independensi dalam penampilan dan independensi dalam kompetensi. Ketidaktahuan auditor dalam proses pelaksanaan audit internal akan melemahkan perannya dalam pengawasan keuangan daerah.

Bagi kepala daerah, hasil pemeriksaan inspektorat merupakan informasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerah (SKPD dan SKPKD). Selanjutnya, kepala daerah akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat sebagai upaya untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengelolaan APBD pada organisasi perangkat daerahnya.

Hubungan *Personal Background* terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Personal background adalah latar belakang seseorang yang melekat pada dirinya seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang dan sebagainya. Sumber daya manusia merupakan pilar peyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian.

Pada penelitian Sitorus (2009) mengatakan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah tetapi pada penelitian Winarna & Murni (2007) menyatakan bahwa *personal background* mempengaruhi secara signifikan terhadap peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

H₁: *Personal Background* berpengaruh positif terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah

Hubungan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Auditor inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Pada penelitian saragih (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas kinerja auditor inspektorat provinsi sumatera utara dan pada penelitian sitorus (2009) menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif.

H₂ : Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah.

Hubungan *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Personal background dan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh penting dalam pengawasan keuangan daerah dikarenakan latar belakang pendidikan dan sebaran tinggi pengetahuan auditor inspektorat akan mempengaruhi kinerjanya dalam mengawasi keuangan daerah.

Pada penelitian Rimbano (2016) pengelolaan keuangan daerah dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan keuangan daerah dan pengetahuan audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan *personal background* secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah, dan pada penelitian winanrna & murni (2007) Menyebutkan bahwa *personal background, political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

H₃ : *Personal Background* dan Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (asosiatif kausal) yaitu ikatan variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y (Erlina, 2007:66).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari kuesioner yang diantarkan langsung kepada responden yaitu auditor Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi pertanyaan/pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu yang bertugas melakukan pengawasan sebanyak 32 orang.

4. HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner itu. Jika r hitung daripada r tabel dan berkorelasi positif maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total variabel.

Tabel 1
Uji Validitas Data Personal Background

| Korelasi Antara | r_{hitung} | r_{tabel} | Sig. | Keterangan |
|---------------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Pertanyaan 1 dengan total | 0,692 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 2 dengan total | 0,390 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 3 dengan total | 0,741 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 4 dengan total | 0,461 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 5 dengan total | 0,645 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 6 dengan total | 0,482 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 7 dengan total | 0,389 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 8 dengan total | 0,718 | 0,2185 | 0,00 | Valid |

Tabel 2
Uji Validitas Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

| Korelasi Antara | r_{hitung} | r_{tabel} | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Pertanyaan 1 dengan total | 0,392 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 2 dengan total | 0,513 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 3 dengan total | 0,378 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 4 dengan total | 0,385 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 5 dengan total | 0,375 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 6 dengan total | 0,574 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 7 dengan total | 0,576 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 8 dengan total | 0,610 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 9 dengan total | 0,579 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 10 dengan total | 0,568 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 11 dengan total | 0,641 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 12 dengan total | 0,357 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 13 dengan total | 0,425 | 0,2185 | 0,00 | Valid |

Tabel 3
Uji Validitas Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

| Korelasi Antara | r_{hitung} | r_{tabel} | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Pertanyaan 1 dengan total | 0,667 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 2 dengan total | 0,741 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 3 dengan total | 0,840 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 4 dengan total | 0,452 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 5 dengan total | 0,702 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 6 dengan total | 0,808 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 7 dengan total | 0,796 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 8 dengan total | 0,743 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 9 dengan total | 0,779 | 0,2185 | 0,00 | Valid |
| Pertanyaan 10 dengan total | 0,770 | 0,2185 | 0,00 | Valid |

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh *item* pertanyaan dalam kuesioner mempunyai *item-totalcorrelation* > 0,2185 maka pertanyaan tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Pengukuran reliabel dalam penelitian ini adalah *one shot*. *One shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh *item*/pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan *alpha cronbach*. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai *alpha cronbach* > 0,6. Perhitungan nilai koefisien reliabilitas untuk instrumen penelitian yang digunakan, diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4
Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>alpha cronbach</i> | Batas Reliabilitas | Keterangan |
|---|-----------------------|--------------------|------------|
| Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) | 0,731 | 0,6 | Reliabel |
| <i>Personal Background</i> (X ₁) | 0,718 | 0,6 | Reliabel |
| Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂) | 0,774 | 0,6 | Reliabel |

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian, karena diperoleh nilai koefisien reliabilitas > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda.

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linear berganda untuk menjawab analisis pengaruh *personal background* dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah X₁ dengan Y, X₂ dengan Y, yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5
Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 5,846 | 6,286 | | ,930 | ,360 |
| PB | 1,315 | ,571 | ,294 | 2,302 | ,029 |
| PTPKD | ,511 | ,104 | ,630 | 4,936 | ,000 |

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS maka diperoleh nilai konstan sebesar 5,846 sedangkan nilai untuk variabel *personal background* (X₁) sebesar 1,315, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah (X₂) sebesar 0,511. Sehingga apabila dimasukkan kedalam fungsi asli regresi linear berganda, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,846 + 1,315X_1 + 0,511X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 5,846 menunjukkan harga konstanta, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sama dengan 23,110.
- Koefisien X_1 (b_1) = 1,315, dapat dilihat bahwa nilai t 2,302 dan nilai p -value (0,029) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis didukung, yang artinya variabel *Personal Background* (X_1) berpengaruh positif terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).
- Koefisien X_2 (b_2) = 0,511, dapat dilihat bahwa nilai t 4,936 dan nilai p -value (0,000) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis didukung menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Uji Parsial (t -test)

Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau *sig.* Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni jika nilai 5 % maka nilai koefisien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikan yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial \neq 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5 %.

1. Pengaruh *Personal Background* terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Personal background pada tabel 5 dalam kolom *unstandardized coefficients* memiliki nilai B sebesar 1,315, nilai *standard error* 0,571. Sedangkan dalam kolom *standardized coefficients* memiliki Beta sebesar 0,294. Pada kolom *tpersonal background* memiliki nilai 2,302 dan tingkat signifikannya adalah 0,029 menunjukkan nilai signifikan 0,029 < 0,005 dan nilai dari uji $t = 2,302 <$ nilai t kritis 2,045. Dengan demikian, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima artinya *personal background* berpengaruh signifikan terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada kabupaten labuhan batu.

2. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah menunjukkan pada tabel 5 pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,511, nilai *standard error* 0,104. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,630. Pada kolom t pengaruh pengetahuan tentang keuangan daerah memiliki nilai 4,936 dan tingkat signifikannya adalah 0,000. Nilai signifikan 0,000 < 0,005 dan nilai dari uji $t = 4,936 >$ nilai t kritis 2,045. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Labuhan Batu.

Uji Simultan (f -test)

Menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan < α atau 0,000 < 0,05. Hasil uji pada tabel IV.13 diketahui bahwa nilai dari uji F 16,763 > nilai

kritis F 3,33 dan nilai signifikan $0,000 < 0,5$. Dalam hal ini H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,732. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi / hubungan antara peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dengan dua variabel independennya adalah kuat ($>0,5$). nilai R Square (Koefisien determinasi) adalah 0,536. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,504. Hal ini berarti 50,4% variasi dari peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel independen yaitu *personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya ($100\% - 50,4\% = 49,6\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

5. PEMBAHASAN PENELITIAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial), diketahui bahwa variabel *Personal Background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Personal Background* (X_1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen *Personal Background* mempunyai pengaruh positif terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah, artinya setiap kenaikan *Personal Background* turut meningkatkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Inspektorat harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Maka, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang auditor maka akan semakin baik tingkat kematangan berpikirnya dan tingkat ketepatan dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian tidak mendukung hasil penelitian Sitorus (2009) yang menyatakan bahwa *Personal Background* tidak mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa *Personal Background* mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah, artinya setiap kenaikan Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut meningkatkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Bagi inspektorat, auditor yang mereka miliki harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Sitorus (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Dari hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa variabel *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil pengujian parsial dari variabel *Personal Background*, nilai probabilitas *Personal Background* lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien variabel *Personal Background* positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara *Personal Background* dengan variabel Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah secara statistik. Hasil pengujian parsial dari variabel Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, nilai probabilitas Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan koefisien variabel Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan variabel Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah secara statistik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya untuk meningkatkan R^2 bisa melakukan penambahan variabel independen yang mempengaruhi Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Hasil penelitian Penelitian selanjutnya dapat memperluas area survey atau diluar Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu agar lebih meningkatkan mengenai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan memiliki *personal background* yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan para Auditor dalam Pengawasan keuangan Daerah.
3. Hasil penelitian ini sebaiknya minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, 2012 *Auditing Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat.
- Agoes Sukrisno, 2013 *Auditing Buku II*, Jakarta : Salemba Empat.
- Amalia, Fitri. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)". Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Budiono, Tania. 2014. *Keterbatasan Financial Attitude, Financial Behaviour & Financial Knowledge* pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

- Conner, K.R dan Prahalad, C.K (1996). *A Resources-Based Theory Of The Firm : Knowledge Versus Oppurtunism*. Organization Science, 7 (5), 477501.
- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaka winarna dan Sri Murni (2007). “Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Kerasidenan Surakarta Dana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)”. *Jural Bisnis Dan Akuntansi* Vol 9,No 2, Agustus 2007.
- Juliandi Azuar, Irfan, Saprial Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Edisi Kedua*, UMSU Press, Medan.
- La Palombara, J. 1974. *Politic With In Nation*. Englewood Cliffs : Prentice – Hall Inc.
- Manurung, Adler H dan Rizky, Luthfi T, 2009. *Succesful Financial Palnner : A Complete Guide*. Jakarta : Grasindo
- Mardiasmo. (2001). *Akuntasnis Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.
- M.D Ulum Ihyaul (2012). *Audit sektor Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mulia Andirfa dan Sri Wahyuni (2018). “Pengaruh *Personal Background* Dan Pengetahuan Auditor Inspektorat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Lhokseumawe)”. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* Volume 4 No 1, Februari 2018.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 20 Tahun 2001, tentang *Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah, No 05 Tahun 2004, *tentang Pemebentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah*.
- Putu, A., Musmini, Lucy., dan Sujana. 2014. “Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah, *personal background*, komitme, dan kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* Vol 2 No. 1.
- Rimbano, Dheo. 2016. “Pengaruh kompetensi keuangan auditor (*personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah srta proses pelaksanaan audit internal) terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Musi Rawas”. *Jurnal Adminika* Vol 2 No.1.
- Rumengan,Jemmy, (2013). *Metodologi Penelitian*. Cita Pustaka Media Peritis. Medan.
- Saragih, Dita Amanda. 2016. “Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengalaman Auditor, akuntabilitas, dan Independensi terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sitorus, Andi Haposan. 2009. “Pengaruh *Personal Background* Dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Studi Kasus Inspektorat Dalam Pemerintah Kabupaten Langkat.” Skripsi, USU, Medan.
- Syahrudin & Werry, 2002:23) Indikator Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Pelita* Vol.XI No.2
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksaan Keuangan*.
- _____.Nomor 25 Tahun 1990 jungto (jo). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____.Nomor 25 Tahun 1999 jungto (jo). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

- Widayati, Irin. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Literasi Finansial* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol.1 Madiun. IKIP PGRI Madiun.
- Winanrna, Murni 2007. “*Pengaruh Personal Background, Political Bakground dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Semarang*.